

ABSTRAK

Dalam rangka melindungi anak dari diskriminasi dan untuk melakukan pemenuhan hak-haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), pencatatan identitas anak perlu dilakukan sejak kelahirannya, namun masih banyak anak di Indonesia yang belum tercatat kelahirannya, terutama anak terlantar. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya anak terlantar di Indonesia yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga tidak dilindungi keberadaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran dan akibat hukum jika seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ditambah penelitian lapangan yang hasilnya dengan metode kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak terlantar dalam mendapatkan akta kelahiran berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum sepenuhnya terlaksana karena masih banyak kendala yang dihadapi terutama masalah kelengkapan syarat permohonan pembuatan akta kelahiran yang telah ditentukan oleh pemerintah sehingga menyebabkan belum semua anak terlantar di Indonesia mendapatkan haknya untuk mempunyai akta kelahiran. Akibat tidak terpenuhi hak anak dalam mendapatkan hak identitas diri berupa akta kelahiran, anak terlantar tersebut tidak mempunyai kepastian hukum mengenai identitas dirinya, tidak dapat mendapatkan hak-haknya dalam bidang sosial, ekonomi dan budaya serta hak-hak lain yang seharusnya didapatkan.